

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN BARANG BUKTI
BERUPA KAPAL LAUT DI KOTA BATAM
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI
DI KOTA BATAM)**

SKRIPSI



**Oleh :
Susanna
130710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN BARANG
BUKTI BERUPA KAPAL LAUT DI KOTA
BATAM
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI
DI KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Susanna
130710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Batam, 01 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

SUSANNA
130710013

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN BARANG BUKTI
BERUPA KAPAL LAUT DI KOTA BATAM (STUDI PADA
KEJAKSAAN NEGERI DI KOTA BATAM)**

Oleh:

**SUSANNA
130710013**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 01 Februari 2017

**EFFENDI SEKEDANG, S.H, M.H
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, sekaligus sebagai Ketua Penguji dan Pak Padrisan Jamba, S.H., M.H. sebagai Anggota Penguji Penulis.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Effendi Sekedang S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Hasbi Kurniawan, selaku Jaksa Muda Ketua Pembinaan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Batam guna melengkapi skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 01 Februari 2017

Susanna

ABSTRAK

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 44 disebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam dan bagaimana kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan Jaksa sebagai eksekutor (pelaksana putusan hakim), tetapi dalam hal barang bukti berupa kapal laut yang diputus untuk dikembalikan kepada pemiliknya, pihak kejaksaan tidak menjaganya dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan akan terjadi kerusakan terhadap barang bukti berupa kapal laut tersebut. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan perlu adanya kerja sama antar instansi guna melakukan penegakan hukum pidana agar barang bukti tersebut dapat dijaga sebagaimana mestinya, hendaknya pemerintah khususnya lembaga kejaksaan mestinya menginstruksikan dibentuknya RUPBASAN. Hal ini tentu saja harus diadakannya suatu peraturan tersendiri yang memberikan kewenangan serta anggaran yang akan diperlukan oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan atas barang bukti berupa kapal laut.

Kata Kunci :Kapal laut, Barang Bukti,Kewenangan Kejaksaan.

ABSTRACT

In The Code of Criminal Procedure in Article 44 states that the storage of confiscated objects implemented with the best and the responsibility for it is on the competent authority in accordance with the level of inspection in the judicial process and these objects are prohibited to be used by anyone. Thus, the study discusses how the prosecutorial authority after a court judgment on the management of evidence in criminal cases and how the management of evidence in the form of ships carried out by the State Attorney Batam. This research is considered as empirical legal research in which defines as researches to find theories about the activities law process in societies. The results indicated that the authority of the Prosecutor in performing the task execution (executing the judge's decision), but in terms of evidence, sea crafts were determined to return to its owners, the possibility of defective evidence due to the prosecutors who didn't take good care of it. By having this research, we expected the necessary of inter agency cooperation for the enforcement, especially regarding to the management of evidence, sea crafts. Thus, the government should properly instruct the prosecutor institutions in the establishment of RUPBASAN. Prior to the RUPBASAN, the prosecution should manage and maintain the fine the evidence. This of course should be the holding of a separate regulation that gives the authority and the budget will be needed by the prosecution in managing the above items by ships.

Keywords: *Ship, Evidence, Prosecutorial Authority.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	
PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	iv
Keywords: Ship, Evidence, Prosecutorial Authority.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Pembatasan Masalah.....	12
1.4. Perumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Yuridis	15
2.1.1. Pengelolaan	15
2.1.2. Barang Bukti	16
2.1.3. Kapal Laut.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Pemikiran	32
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian Empiris	33
3.2. Sumber Data	34
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4. Alat Pengumpulan Data	37
3.5. Analisis Data.....	38
3.6. Lokasi Penelitian	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Kapal Laut di Kota Batam	40
4.2. Kewenangan Kejaksaan Atas Kedudukan Barang Bukti Perkara Pidana Pasca Putusan Pengadilan	69
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

SURAT KETERANGAN PENELITIAN